

ABSTRAK

IMPLIKASI HAK *RECALL* PARTAI POLITIK TERHADAP SISTEM KEDAULATAN RAKYAT

Oleh

MALICIA EVENDIA

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak *recall* partai politik sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak *recall* partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, bahkan menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Dengan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, memberikan kewenangan yang besar kepada partai politik untuk mengingkari atau menegasikan hasil pilihan rakyat selaku pemegang kedaulatan demi kepentingan partai politik. Adanya hak *recall* partai politik akan menjadikan anggota dewan lebih loyal kepada partai politik dibandingkan dengan rakyat.

Kata Kunci : Recall, Kedaulatan Rakyat, dan Partai Politik.

ABSTRACT

THE IMPLICATIONS RECALL RIGHT OF POLITICAL PARTIES AGAINST THE SYSTEM OF POPULAR SOVEREIGNTY

By

MALICIA EVENDIA

This research aims to find out if the recall rights arrangements of political parties in line with the principle of popular sovereignty. This type of research is normative, using statute approach, case approach and historical approach. The data was collected by means of literature study. The results showed that setting recall right political parties as provided for in Article 213 paragraph (2) letter e Law Number 27 Year 2009 about the MPR, DPR, DPD and DPRD, and Article 16 paragraph (1) of Law Number 2 year 2008 about Political Parties, as changed with Act number 2 year 2011 about the Amendment Act Number 2 year 2008 about Political Parties, the arrangements of the recall right a political party in legislation, not in line with the principle of popular sovereignty, even shift the sovereignty of the people become sovereign party. With a variety of laws and regulations, gives great authority to a political party for deny or negate the results of the people's choice as the holder of sovereignty in the interests of political parties. The presence of rights recall potical parties will make a council member more loyal to political party compared with the people.

Key word : Recall, Sovereignty of the People, and Political Party.